

SEKTOR INFORMAL PERKOTAAN DAN IKHTIAR PEMBERDAYAANNYA

Moh. Ilyas Rolis^{*)}

Abstrak

Tulisan ini merupakan ringkasan penelitian penulis tentang gambaran kehidupan pelaku sektor informal perkotaan yang bergerak di bidang jasa angkutan yakni tukang becak di kota Probolinggo. Potret kehidupan meliputi lingkungan politik, sosial, ekonomi, kesehatan dan pengetahuan serta asset yang dimiliki oleh kalangan pekerja. Selanjutnya, dari asset ini bisa dikembangkan penguatan dalam bentuk kebijakan oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci: Sektor Informal, Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pendahuluan

Sektor informal, dengan segala keterbatasan dalam dirinya tersimpan kekuatan luar biasa sebagai penyangga ribuan bahkan jutaan kelangsungan hidup warga. Dalam banyak penelitian, sektor ini mampu menjadi tempat berlindung hingga mencapai 70 persen tenaga kerja di Negara sedang berkembang. Di kota-kota sedang seperti Kota Probolinggo juga menunjukkan trend yang sama, mengalami kenaikan tiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan sektor informal yang mudah menyerap tenaga kerja yang memiliki skill rendah serta memiliki kelenturan tinggi bagi siapapun yang ingin mengais rezeki didalamnya.

Para pekerja yang bergerak dalam sektor informal memiliki kerentanan yang tinggi karena tidak memiliki proteksi yang memadai baik dari sisi ekonomi, sosial maupun politik. Sektor informal bergerak dalam usaha perdagangan seperti pedagang asongan, penjual bakso, dan PKL serta jasa pengangkutan seperti tukang ojek dan tukang becak, yang menjadi sandaran hidup diri dan keluarganya. Kenaikan harga BBM sejak bulan Mei 2013 ini tentu memiliki efek yang turut mengantarkan mereka ke dalam kerentanan yang lebih dalam lagi.

Tulisan ini merupakan deskripsi singkat dari laporan penelitian untuk mengetahui tentang gambaran kemiskinan para pekerja sektor informal Kota

^{*)} Dosen tetap pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Sunan Ampel Surabaya

Probolinggo yang berprofesi sebagai tukang becak serta menjajaki alternatif pemberdayaannya.

Sektor Informal, Memahami Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Sektor Informal Perkotaan

Sebagai bagian dari sistem perekonomian di Indonesia, keberadaan sektor informal memiliki daya serap terhadap tenaga kerja yang cukup besar dan berperan sebagai sektor penyangga (*buffer zone*) yang sangat lentur dan terbuka, juga memiliki kaitan erat dengan jalur distribusi barang dan jasa di tingkat bawah, dan bahkan menjadi ujung tombak pemasaran yang potensial (Bagong Suyanto dan Karnaji;2005;46).

Konsep sektor informal, jika ditilik dari asal muasalnya sebenarnya merupakan suatu jenis teori dualisme baru yang pernah populer yang dikembangkan dalam penjelasan klasik Boeke. Konsep tentang sektor informal pertama kali dilontarkan oleh Keith Hart, seorang antropolog Inggris pada tahun 1973 (Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi;1985; 75). Hart, berdasarkan hasil pengamatannya membedakan kegiatan penduduk kota dalam memperoleh kesempatan kerja kedalam dua sektor yakni formal dan informal. Hart membedakan kedua sektor tersebut hanya didasarkan atas sumber penghasilan yakni pendapatan yang bersumber dari gaji atau pendapatan dari usaha sendiri. Perbedaan sektor informal dan formal yang menjadi inti gagasan Hart kemudian mengilhami beberapa penelitian yang menerapkan konsep sektor informal di kota dunia ketiga.

Sethuraman, koordinator tim peneliti ILO yang berasal dari Sri Lanka kemudian merumuskan beberapa ciri yang melekat pada pelaku sektor informal. Berdasarkan hasil penelitiannya di delapan kota dunia ketiga, Sethuraman menemukan bahwa mereka yang terlibat dalam sektor informal ini kebanyakan berada pada usia kerja utama (*prime age*), berpendidikan rendah, memiliki pendapatan rendah dibawah upah minimum, modal usaha rendah, sektor ini umumnya menampung perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian serta memiliki kemungkinan untuk mobilitas vertikal (Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi (ed);1985;90-94).

Rendahnya pendapatan pelaku sektor informal dibawah rata-rata pendapatan pelaku sektor formal memantik kritik keras dari ahli yang juga memiliki concern terhadap sektor ini. Dipak Mazumdar (Ibid;110-130), seorang ekonom India dari Bank Dunia mengetengahkan fakta yang berbeda bahwa pekerja di sektor informal memperoleh penghasilan yang bervariasi dan tidak ada bukti kuat bahwa pelaku di sektor ini secara menyeluruh lebih rendah daripada pendapatan pelaku sektor formal seperti buruh pabrik dan karyawan.

Sektor informal dengan segala persamaan dan perbedaan dengan sektor formal (lihat tabel 2) sering dipertukarkan dengan beragam istilah, diantaranya aktivitas informal (*informal activity*), kesempatan kerja yang diciptakan sendiri (*self employment*), ekonomi bawah tanah (*underground economy*), ekonomi pasar gelap (*black market economy*), ekonomi bayangan (*shadow economy*) maupun kerja sampingan (*causal work*) (Subarsono;2002;25).

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Sektor Informal Dan Formal Perkotaan

Aspek	Sektor Informal	Sektor Formal
Skala usahanya	Kecil dan tak berbadan hukum	Menengah hingga besar dan berbadan hukum
Kelayakan usaha	Tidak ada/seadanya	Ada dan diprioritaskan
Pembukaan usaha	Tidak ada/ sederhana	Ada sesuai standar
Permodalan	Kecil	Menengah hingga besar
Perencanaan usaha	Ada sambil jalan	Ada dan terus menerus
Sumber modal	Milik sendiri/patungan Bermitra dengan bank plecit (lembaga keuangan tidak resmi)	Milik sendiri/patungan bermitra dengan Bank umum (lembaga keuangan resmi)
Perputaran modal	Lambat	Cepat
Pengakuan negara	Tidak ada/kecil	Diakui
Perlindungan hukum	Tidak ada/kecil	Dilindungi
Bantuan negara	Tidak ada/tidak sampai	Rutin
Izin usaha	Tidak resmi	Resmi dari negara
Pemberi izin	RT/RW/tetangga usaha	Negara
Unit usaha	Mudah berganti	Relatif tetap
Kegiatan usaha	Kurang terorganisasi	Sangat terorganisasi
Organisasi	Kekeluargaan	Birokrasi
Teknologi	Sederhana dan padat karya	Modern dan padat modal
Pendidikan formal	Tidak begitu diperlukan	Sangat diperlukan
Keterampilan	Tidak berasal dari lembaga formal/alamiah	Berasal dari lembaga formal
Jam kerja	Tidak tentu	Rutin, profesional
Stok barang	Sedikit hingga sedang	Sedang hingga besar
Kualitas barang	Rendah hingga menengah	Standar
Omzet	Tidak tentu dan sulit diprediksi	Tidak tentu akan tetapi dapat diprediksi
Khalayak pasaran	Kelas bawah, menengah, hingga atas	Kelas bawah, menengah, hingga atas
Jumlah karyawan	Tidak tentu, biasanya 1-5 orang	Tidak tentu, lebih dari 5 orang

Hubungan kerja	Keluargaan dan saling percaya	Berdasarkan kontrak yang disepakati
Hubungan majikan dan karyawan	Keluargaan, teman, tetangga	Bebas memilih karyawan sesuai kebutuhan
Tempat usaha	Mudah berpindah-pindah dan sempit	Permanen dan luas
Kontribusi terhadap negara	Relatif kecil	Relatif besar
Karakteristik usaha	Mudah dimasuki	Sulit dimasuki

Sumber: Alisjahbana dalam Bagong dan Karnaji, Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial, Surabaya: Airlangga University Press, 2005, hal 49

Senada dengan pembedaan Alisjahbana diatas, Hyla Mynt membedakan sektor modern dengan sektor tradisional kedalam beberapa karakteristik (Hyla Mint; 1985;30). Pertama, unit ekonomi dalam sektor modern sangat terspesialisasi dan terintegrasi penuh, sedangkan pada sektor tradisional memiliki derajat spesialisasi yang rendah. Kedua, sektor modern mencakup usaha-usaha besar yang padat modal dengan teknologi modern, sementara di sektor tradisional penggunaan alat-alat teknologi masih sederhana dan padat karya. Ketiga, usaha bisnis modern mempekerjakan tenaga kerja atas dasar regulasi dan membayar atas dasar produktivitas marjinal, sedangkan di sektor tradisional menyerap tenaga kerja dari lingkungan keluarga dan dibayar atas dasar produktivitas rata-ratanya. Keempat, unit ekonomi di sektor modern memiliki akses ke lembaga keuangan resmi, sedangkan sektor tradisional memiliki akses terbatas terhadap lembaga keuangan resmi, dan sering terjerat bunga mencekik dari lembaga keuangan tidak resmi.

Dalam pandangan Boeke di atas, yang menggunakan istilah rumah tangga desa (pra-kapitalis) ditandai oleh usaha yang bermodal kecil, usaha yang dirintis sendiri atau lingkup keluarga, dan terbatas pada lokalitas tertentu. Sedangkan Goldthorpe, menggunakan istilah yang berbeda untuk sektor informal yang disebut sektor swasta pribumi (indigenous private sektor) (J. H. Goldthorpe;1992;145). Sektor usaha yang padat tenaga, dan merupakan sektor usaha yang banyak beroperasi di negara-negara dunia ketiga.

Mengutip McNamara, sektor informal ini menyediakan hampir separuh dari seluruh lapangan kerja di Bombay dan Jakarta. Sektor informal, meskipun memiliki daya involutif besar dalam menyerap tenaga kerja tapi kurang mendapat respon dan perhatian yang memadai dari pemerintah, seperti kata McNamara, "Dan meskipun demikian, kenyataan ialah bahwa pemerintah cenderung melihat sektor informal itu tanpa terlalu semangat. Mereka menganggapnya terbelakang, tidak efisien, dan menimbulkan sakit hati karena mengingatkan masa lampau yang tidak begitu mudah." (Ibid:248)

Memahami Kemiskinan

Kemiskinan, dalam banyak definisi selalu diartikan dengan kekurangan harta dan kebutuhan dasar lainnya yang dialami seseorang. Kemiskinan menurut cara pandang ini sekedar dilihat sebagai problema ekonomi saja. Karena lebih cenderung pada aspek pendapatan inilah, maka pengukuran kemiskinan juga tampak menggunakan pendekatan ini.

Pengukuran pada aspek pendapatan ini dapat kita temui dalam definisi kemiskinan yang dijadikan patokan Bank Dunia, yakni garis kemiskinan adalah orang yang berpenghasilan dibawah 2 US\$ per hari. Sementara di Indonesia, kategori warga miskin ditentukan berdasarkan garis kemiskinan berupa konsumsi pangan harian 2100 kcal (plus konsumsi bukan pangan) yang setara dengan Rp 136.000 – Rp. 150.000 per bulan per kapita (BPS:2013).

Selama dua dekade terakhir, konsep kemiskinan telah berubah dari pertimbangan pendapatan dan konsumsi diatas menjadi definisi yang mencakup multidimensi kerentanan dan kesejahteraan. Robert Chambers, mengajukan definisi yang secara konseptual jelas dan mendekati kenyataan kemiskinan itu sendiri. Menurut Robert Chambers, permasalahan kemiskinan terletak pada apa yang dia sebut dengan istilah "deprivation trap" atau perangkap kemiskinan. Perangkap kemiskinan, secara rinci terdiri dari lima unsur yakni, pertama, kemiskinan itu sendiri, kedua kelemahan fisik, ketiga keterasingan atau kadar isolasi, keempat kerentanan, dan kelima ketidak berdayaan. Kelima unsur ini seringkali menjadi perangkap yang mematikan dan tidak memberi jalan keluar dari keterperangkapan ini (Robert Chambers;1987;).

Definisi lain yang cakupannya lebih luas adalah pengertian kemiskinan yang diajukan John Friedmann. Menurut Friedman, kemiskinan adalah ketidak samaan kesempatan untuk meng-akumulasi modal baik kapital maupun sosial yang dirinci ke dalam lima aspek. Kelima aspek tersebut, pertama modal produktif atas asset, misalnya perumahan, peralatan dan kesehatan. Kedua, sumber keuangan misalnya pendapatan tetap dan akses lembaga perkreditan yang menopang sumber keuangannya. Ketiga, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama seperti paguyuban atau koperasi. Keempat, jejaring untuk memperoleh kesempatan kerja, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan hidup lainnya, dan kelima adalah informasi yang bermanfaat bagi kehidupan (John Friedmann:1989).

Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat sebenarnya terletak pada pentingnya peningkatan rasa percaya diri masyarakat untuk terlibat dalam proses sosial dan politik dalam kehidupannya. Dalam hal ini Friedmann kembali menegaskan bahwa pendekatan pemberdayaan terletak pada otonomi baik individu maupun

kelompok untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang luas melalui pengalaman langsung. Walaupun pemberdayaan dapat dilakukan pada individu, namun dalam pandangan Friedmann, pemberdayaan pada kelompok lebih diutamakan karena mereka dapat memberikan masukan satu sama lain dan memperkuat barisan untuk memecahkan masalah bersama.

Konsep pemberdayaan jenis ini, selaras dengan cara pandang tentang kemiskinan yang tidak sekedar melihat persoalan ekonomi semata. Konsep pemberdayaan belakangan ini dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini, kembali oleh Friedmann disebut sebagai alternatif kebijakan pembangunan (*alternative development*), yang menghendaki terjadinya demokrasi inklusif dalam arti pelibatan seluas-luasnya masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan untuk menumbuhkan ekonomi (*economic growth*), dan dibangun atas kesamaan kesempatan secara gender (*gender equality*).

Upaya-upaya yang digagas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, Kartasmita mengemukakan tiga cara. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Asumsi yang melatarbelakangi adalah kenyataan bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan bahwa memiliki potensi untuk mengorganisasikan dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan rakyat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemudian meluas ke keluarga, serta masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional. Kedua, memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana yang menopang kehidupan baik fisik (tempat janggolan yang representatif bagi tukang becak, ketersediaan listrik, pembangunan jalan dan irigasi bagi pertanian). Selain sarana yang bersifat fisik, ketercukupan aspek sosial juga perlu dikuatkan seperti layanan kesehatan, pendidikan terjangkau dan permodalan yang mudah diakses lapisan bawah. Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya. Melindungi dan membela dilihat sebagai upaya mencegah persaingan yang tidak seimbang diantara kelompok-kelompok sosial yang memiliki sumber daya berbeda (Ginandjar Kartasmita;1996;19-20).

Tahapan pemberdayaan masyarakat, dapat dilakukan melalui berbagai cara, namun secara umum dapat dibagi ke dalam tiga fase. Pertama, fase inisial, dimana pemerintah merencanakan dan melaksanakan pemberdayaan, sementara rakyat secara pasif menerima keputusan yang diambil oleh pemerintah. Kedua, fase partisipatoris, disini pemerintah bersama rakyat

merencanakan pemberdayaan yang dianggap bermanfaat bagi kelangsungan kehidupannya. Dan fase terakhir, yakni emansipatoris, dimana masyarakat sadar akan kemampuan dan potensi diri serta kelompoknya, kemudian secara mandiri merencanakan dan merancang bentuk pemberdayaan bagi dirinya (Pranarka dan Priyono:1992;2).

Sektor Formal Dan Informal Kota Probolinggo; Peran Strategisnya Bagi Penyerapan Tenaga Kerja

Sektor Formal

Diantara sembilan sektor ekonomi yang berkembang di kota probolinggo terdapat tiga sektor yang menjadi primadona dan lokomotif perekonomian di Kota ini. Ketiga sektor tersebut adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Angkutan dan Komunikasi. Sementara Sektor Pertanian menempati urutan keempat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perekonomian kota Probolinggo kemudian disusul oleh sektor jasa, Sektor keuangan, persewaan dan jasa Perusahaan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Konstruksi dan terakhir Industri pengolahan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merujuk pada total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah dan kurun waktu tertentu. Di Kota Probolinggo penghitungan PDRB dihitung berdasarkan sembilan sektor ekonomi tersebut. Dari data statistik diketahui bahwa sembilan sektor ekonomi di kota Probolinggo menunjukkan trend kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 4.1
PDRB Kota Probolinggo Menurut Lapangan Usaha
Atas dasar Harga Berlaku 2001-2005

Sektor/Sub Sektor	2001	2002	2003	2004	2005*
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian	120.78	131.92	143.51	158.11	171.28
a Tanaman Bahan Makanan	118.59	104.08	91.61	86.91	73.65
b Tanaman Perkebunan	110.42	109.23	122.47	134.27	140.56
c Peternakan	127.64	135.48	151.44	168.95	179.73
d Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e Perikanan	123.40	212.44	292.47	362.43	455.21
Pertambangan Dan Penggalian	113.31	129.41	138.62	147.43	166.43
a Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b Pertambangan Tanpa Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c Penggalian	113.31	129.41	138.62	147.43	166.43
Industri Pengolahan	98.98	98.69	99.77	114.88	122.07

<i>a</i>	<i>Industri Migas</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Pengilangan Minyak Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Gas Alam Cair	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>b</i>	<i>Industri Tanpa Migas</i>	98.98	98.69	99.77	114.88	122.07
1	Makanan Minuman Dan Tembakau	106.11	125.29	138.93	185.54	263.60
2	Tekstil, Barang dari Kulit & Alas Kaki	101.35	93.25	80.63	51.40	64.64
3	Barang dari Kayu & Hasil Hutan lainnya	114.12	139.04	183.53	260.99	246.16
4	Kertas dan Barang Cetakan	196.25	245.29	294.34	318.86	364.74
5	Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	80.28	64.79	41.78	55.07	54.19
6	Semen dan Barang Galian Bukan Logam	102.82	108.47	169.69	299.69	324.61
7	Logam Dasar Besi dan Baja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Alat Angkutan Mesin & Peralatannya	106.37	130.58	163.23	248.29	311.56
9	Barang Lainnya	122.49	179.98	284.08	360.76	441.94
Listrik, Gas dan Air Bersih		121.59	139.35	167.09	187.88	216.20
<i>a</i>	Listrik	122.60	140.09	168.56	189.48	218.30
<i>b</i>	Gas Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>c</i>	Air Bersih	106.54	128.37	145.43	164.25	185.20
Konstruksi		109.74	114.08	122.65	141.56	170.06
Perdagangan, Hotel dan Restoran		119.57	136.57	155.60	179.59	216.59
<i>a</i>	Perdagangan	119.51	136.62	155.90	180.52	218.00
<i>b</i>	Hotel	96.81	101.88	109.09	109.91	122.27
<i>c</i>	Restoran	125.67	143.60	161.27	180.52	215.53
Pengangkutan dan Komunikasi		118.78	147.47	171.72	187.78	260.31
<i>a</i>	<i>Angkutan</i>	119.05	146.08	167.43	182.07	254.95
1	Angkutan Rel	135.50	99.96	81.18	73.24	94.19
2	Angkutan Jalan Raya	118.46	145.18	166.30	180.58	252.64
3	Angkutan Laut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Angkutan Penyeberangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Jasa Penunjang Angkutan	138.14	181.13	213.45	242.60	348.39
<i>b</i>	<i>Komunikasi</i>	117.23	155.65	197.00	221.40	291.91

1	Pos & Telekomunikasi	116.96	154.97	196.39	219.37	290.76
2	Jasa Penunjang Komunikasi	122.42	168.53	208.48	259.70	313.61
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan		112.85	138.80	159.31	184.95	225.81
a	Bank	115.16	149.02	171.14	218.84	278.76
b	Lembaga Keuangan Bukan Bank	113.77	143.97	169.85	194.18	249.70
c	Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	Sewa Bangunan	111.34	133.61	152.19	170.91	200.74
e	Jasa Perusahaan	113.24	131.36	144.84	164.89	186.06
Jasa-jasa		115.68	137.46	156.33	175.81	201.07
a	<i>Pemerintahan Umum</i>	<i>119.11</i>	<i>147.61</i>	<i>168.56</i>	<i>187.20</i>	<i>212.12</i>
1	Adm. Pemerintah & Pertahanan	119.11	147.61	168.56	187.20	212.12
2	Jasa Pemerintah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	<i>Swasta</i>	<i>111.19</i>	<i>124.14</i>	<i>140.28</i>	<i>160.87</i>	<i>186.59</i>
1	Jasa Sosial Kemasyarakatan	111.65	132.54	152.54	172.94	201.77
2	Jasa Hiburan dan Rekreasi	107.06	119.05	128.83	137.35	158.55
3	Jasa Perorangan & Rumah Tangga	111.47	122.32	138.02	159.85	185.16
Produk Domestik Regional Bruto		113.46	128.18	142.89	162.12	193.68

Sumber: Probolinggo dalam Angka tahun 2006

Jika diamati per sektor nampak sektor perdagangan, Hotel dan Restoran mengalami peningkatan yang tinggi dalam menyumbang PDRB Kota Probolinggo.

Yang terlihat menarik adalah sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor Tanaman Bahan Makanan, Tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Walaupun terjadi penyusutan lahan pertanian dan jumlah pekerja yang bergelut di sektor ini (untuk penyusutan tenaga kerja yang bergerak disektor ini lihat tabel 4.3), sektor ini tetap menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun.

Peningkatan pendapatan dalam sektor perdagangan ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki prospek cerah di Kota Probolinggo. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan jumlah pedagang baik yang bercorak tradisional maupun modern meningkat (lihat tabel 4.2). Perkembangan sektor

perdagangan ini kemudian diikuti oleh kenaikan tenaga kerja yang terserap di sektor ini (lihat tabel 4.3).

Posisi Kota Probolinggo yang terletak di antara arus lalu lintas yang menghubungkan kota-kota antara lain, sebelah barat dengan kota Surabaya, Kabupaten dan Kota Pasuruan serta Malang. Di sebelah timur merupakan lalu lintas yang menghubungkan dengan Kabupaten Situbondo dan Bondowoso, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Lumajang dan Jember. Posisi persimpangan antar berbagai Kabupaten/Kota tersebut dinilai strategis dan potensial untuk pengembangan sektor perdagangan. Lalu lintas yang ramai yang menghubungkan kota-kota tersebut baik siang maupun malam hari merupakan keunggulan komparatif dalam meningkatkan perputaran uang dalam transaksi sektor perdagangan.

Perkembangan jumlah pedagang terlihat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 mengalami kenaikan jumlah pedagang yakni dari 2.875 pedagang pada tahun sebelumnya menjadi 3.044 pedagang atau terjadi kenaikan sebesar 5,87persen. dilihat dari perkembangannya, tampaknya pedagang dari tiga klasifikasi sama-sama mengalami kenaikan. Pedagang kecil pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 6,62 persen, pedagang menengah meningkat sebesar 2,23 persen sedangkan pedagang besar yang bergerak di sektor modern mengalami kenaikan yang hampir sama dengan pedagang kecil yakni sebesar 6,12 persen.

Tabel 4.2
Perkembangan Usaha Perdagangan di Kota Probolinggo
Tahun 2002-2005

Jumlah Usaha Perdagangan	2002	2003	2004	2005
Perusahaan Besar	37	42	49	52
Perusahaan Menengah	451	471	486	497
Perusahaan Kecil	1.983	2.160	2.340	2.495
Jumlah	2.471	2.673	2.875	3.044

Sumber: Profil Kota Probolinggo Tahun 2006

Membairnya iklim dalam sektor perdagangan baik yang berskala besar, kecil dan menengah, membuat sektor ini memiliki kemampuan dan daya topang besar untuk menyerap tenaga kerja.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha Tahun
2003-2005
(laki-laki dan Perempuan)

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2003	2004	2005
1	Pertanian	11.097	10.028	9.270
2	Pertambangan dan Penggalian	225	151	81
3	Industri pengolahan	11.730	11.794	12.223
4	Listrik, Gas dan Air bersih	224	150	81
5	Bangunan	5.471	4.693	4.060
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	19.871	22.745	26.380
7	Angkutan dan Komunikasi	11.211	12.019	13.201
8	Keuangan, sewa & Jasa Perusahaan	1.303	1.276	1.289
9	Jasa-jasa	15.377	15.144	15.380
10	Lainnya	806	477	161
Jumlah		77.260	78.477	82.126

Sumber: Susenas 2003-2005, BPS Kota Probolinggo

Sektor Informal dan Peranannya bagi Penyerapan Tenaga Kerja

Sektor informal sebagai sasaran yang dicari para pencari pekerja terutama dari daerah pedesaan maupun kaum miskin perkotaan yang memiliki keterampilan kurang memadai serta permodalan yang kecil dipengaruhi oleh faktor pendorong (push factor) dan faktor penarik (pull factor). Sebagai faktor pendorong (push factor) adalah semakin menciutnya lahan pertanian yang biasa digarap dan menjadi sandaran kehidupannya.

Di Kota Probolinggo, data menunjukkan (dalam kurun sepuluh tahun terakhir) lahan pertanian mengalami penyusutan tajam. Sebagai perbandingan lahan sawah di Kota Probolinggo pada tahun 2004 hanya seluas 2.122,80 ha (37,46persen) dari total luas wilayah Kota Probolinggo yang tercatat 5.666,70 ha, sementara lahan non-sawah seluas 3.543,90 ha. Tahun berikutnya, yakni tahun 2005, perubahan lahan sawah ke lahan non-sawah meningkat lagi, yakni luas lahan sawah tinggal 1.971,20 ha sedangkan luas lahan non-sawah bertambah menjadi 3.695,50 ha.

Penyempitan lahan sawah ini terlihat pada penyusutan yang terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003, tercatat lahan sawah seluas 2.156 ha, sementara pada tahun berikutnya yakni tahun 2004 hanya tersisa 2.122,80 ha, terjadi penyusutan sebesar -1,56 persen atau kurang lebih seluas 33,70 ha. Di tahun berikutnya, luas lahan sawah berkurang hingga -7,14 persen atau kurang lebih 151,60 ha. Jika pada tahun 2004, lahan sawah seluas 2.122,80, maka tahun

2005 tersisa seluas 1.971,20 ha. Berkurangnya luas lahan sawah ini juga berarti berubahnya fungsi dari lahan pertanian menjadi sektor perumahan dan bangunan kantor/usaha baru.

Pergeseran fungsi lahan pertanian menjadi sektor perumahan, perkantoran, perhotelan dan pusat perdagangan menyebabkan perburuan tenaga kerja serta mata pencaharian juga mengikuti arah pergeseran ini pula.

Perkembangan sektor formal yakni perhotelan, industry dan perdagangan di Kota Probolinggo juga turut menarik perhatian (pull factor) para pencari pekerja untuk memanfaatkan untuk mengais ekonomi seiring peningkatan sektor ini.

Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian tidak serta merta tertampung dalam sektor formal tersebut diatas, melainkan masuk dalam jaringan sektor kerja informal mulai pedagang kecil sebagai asongan, pedagang kaki lima, penjual bakso, nasi goreng di sekitar pabrik maupun hotel. Selain usaha dagang kecil, juga bergerak dalam sektor jasa angkutan seperti tukang ojek, tukang becak maupun tenaga angkut barang di pasar kota probolinggo. Walaupun belum ada data yang memadai tentang keberadaan dan jumlah para pekerja di sektor ini, namun sesuai watak sektor ini yang lentur dan tidak menuntut skill tinggi, maka penyerapan tenaga kerja pada sektor ini lebih besar daripada sektor formal.

Potret Kehidupan Pekerja Sektor Informal Kota Probolinggo

Pengetahuan

Hasil pemantauan dan survey yang dilakukan selama kurun waktu tiga bulan yang dilakukan surveyor lapangan menunjukkan beberapa temuan berikut. Secara umum, tingkat pendidikan rerata para tukang becak di kota probolinggo tergolong masih rendah, hal ini terlihat dari jumlah responden yang berijazah SD sebanyak 40 persen, kemudian tidak memiliki ijazah (belum menamatkan sekolah dasar) sebesar 20 persen dan sisanya sebanyak 40 persen berijazah sekolah lanjutan pertama. Selain pendidikan formal yang dijadikan patokan dalam pertanyaan penelitian, keterampilan lain yang dimiliki juga kurang memadai dan menopang secara ekonomi. Tercatat sebanyak 60 persen lebih hanya memiliki keterampilan sebagai buruh tani disamping kegiatan menarik becak, sementara sisanya tersebar ke dalam keterampilan lain-lain seperti memijat, membuat kurungan ayam dan burung.

Alasan rendahnya pengetahuan para pekerja di sektor ini kuat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum, keterlibatan para responden sejak kecil dalam mengais rezeki membantu orang tua menyebabkan tersendatnya untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Keterlibatan mereka dalam bekerja menciptakan situasi dimana terjadi ketidakteraturan dalam masuk sekolah.

Namun kondisi ini tidak lagi berlanjut sampai saat ini, dimana para responden memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kecenderungan ini dikarenakan biaya untuk sekolah dasar dan lanjutan relatif terjangkau, juga layanan pendidikan oleh swasta maupun pesantren di dekat wilayah tinggal mereka turut membantu peningkatan pendidikan anak-anak mereka. Hal ini sebagai kabar gembira dari kehidupan para pekerja sektor ini sekarang, walau bayangan kekhawatiran atas hal lainnya juga membentang. Kekhawatiran itu adalah hilangnya kemampuan dan kesadaran untuk melestarikan "pengetahuan tradisional" yang sempat mereka miliki pada masa lalu.

Kecenderungan umum yang ditemui di lapangan berdasarkan wawancara mendalam diketahui bahwa sebagian mereka merasa telah kehilangan kemampuan untuk mengimplementasikan "pengetahuan tradisional" seperti kecakapan membuat obat tradisional sebagaimana diajarkan orang tua mereka dulu dan dipraktikkan semasa kanak-kanak mereka tatkala sakit. Keterampilan lain yakni membuat dan meramu sabun cuci berasal dari buah kelerek (sejenis bijian yang mengeluarkan buih banyak untuk keperluan mencuci). Teknik pertanian kuno juga telah mereka lupakan karena merasa tidak bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan masa mendatang.

Kesehatan

Secara umum akses terhadap layanan kesehatan responden cukup bagus hal ini terlihat dari presentase pemanfaatan layanan kesehatan cukup tinggi. Sebanyak 70 persent lebih responden merasa pernah menggunakan jasa layanan kesehatan baik untuk mengkhitankan anaknya maupun kebutuhan lainnya di puskesmas. Keterlayanan responden tidak berarti bahwa pelayanan yang mereka terima baik jasa perawatan maupun obat juga baik, melainkan dari tempat satu dan tempat (puskesmas) lainnya berbeda-beda.

Persoalan yang menuntut perhatian adalah layanan air bersih terutama bagi abang becak yang menggunakan layanan air bersih PDAM. Hal ini dikarenakan tidak ada biaya keringanan untuk penggunaan layanan air bersih ini sesuai profesi mereka yang tergolong berpenghasilan pas-pasan. Pemanfaatan air sumur juga perlu mendapat perhatian karena semakin tahun semakin mengalami penyusutan dan bagi mereka yang tinggal di dekat pabrik dan rumah sakit merasakan ketercemaran air sumur mereka.

Sosial

Secara keseluruhan, lingkungan social baik kegiatan gotong royong maupun saling bantu dikalangan tukang becak cukup bagus. Kohesi social di lingkungan keluarga mereka pun cukup tinggi. Hal ini tergambar dari jawaban responden bahwa mereka mendapat pinjaman (hutangan) dari temannya sesama pengayuh becak baik berupa uang maupun barang. Sebanyak 89 persen responden mengaku pernah meminjam maupun dipinjami diantara temannya seprofesi.

Namun sikap saling percaya dan gotong royong ini ini tidak berlanjut untuk urusan pembangunan sarana public maupun pemerintah maupun kegiatan formal ekonomi mereka. Meskipun opengakuan mereka merasa pernah mendapat hurtangan maupun pernah membantu temannya (sebanyak 89 persen), tetapi mereka enggan untuk menggalang kegiatan bersama tanpa upah.

Saling percaya yang terbangun diantara para pekerja ini merupakan modal sosial yang mesti harus dilestarikan dan diperkuat oleh sikap-sikap pemerintah untuk mendorong mereka berkiprah lebih luas dalam mendukung pembangunan kota.

Konflik-konflik kecil juga sering mewarnai dalam pekerjaan mereka. Konflik terjadi karena perebutan area atau wilayah dimana merasa sebagai "pemilik tak resmi" dari sebuah janggolan maupun tempat untuk mencari penumpang. Meskipun demikian, konflik tidak pernah meluas menjadi pertentangan antar kelompok. Konflik sering bersifat spontanitas dan mekanisme penyelesaian konflik juga dilakukan oleh internal sesama teman seprofesi. Atas konflik-konflik spontanitas ini, sebanyak 62,5 persen mengaku pernah terlibat cekcok diantara mereka dalam urusan berebut penumpang namun tidak berlangsung lama.

Ekonomi

Profesi sebagai tukang Becak merupakan sandaran utama bagi kehidupan mereka dan enggan untuk pindah atau alih profesi ke sektor lainnya. Keterampilan lain disamping mengayuh becak yang dimiliki mereka adalah sebagai buruh tani, hal yang tidak mungkin dilakukan kembali oleh mereka. Sebanyak 67,4 persen mengaku bahwa pekerjaan sebagai buruh tani tidak memungkinkan karena semakin sempitnya lahan saat.

Kecenderungan melihat pesimisme dalam mengolah pertanian bias dimaklumi mengingat semakin tahun terjadi penyusutan lahan pertanian di wilayah sekitar tempat tinggal mereka. Data statistik menunjukkan Penyempitan lahan sawah ini terlihat pada penyusutan yang terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003, tercatat lahan sawah seluas 2.156 ha, sementara pada tahun

berikutnya yakni tahun 2004 hanya tersisa 2.122,80 ha, terjadi penyusutan sebesar -1,56 persen atau kurang lebih seluas 33,70 ha. Di tahun berikutnya, luas lahan sawah berkurang hingga -7,14 persen atau kurang lebih 151,60 ha. Jika pada tahun 2004, lahan sawah seluas 2.122,80, maka tahun 2005 tersisa seluas 1.971,20 ha. Berkurangnya luas lahan sawah ini juga berarti berubahnya fungsi dari lahan pertanian menjadi sektor perumahan dan bangunan kantor/usaha baru.

Atas pilihan-pilihan alih profesi yang disodorkan, mereka nampaknya lebih memilih bertahan di sektior informal ketimbang bekerja di sektor formal. Pilihan di setor informal yang disuguhkan yakni sebagai buruh petani, atau nelayan maupun buruh panggul di pasar dipilih sebanyak 55,7 persen. Sementara pilihan sebagai buruh pabrik kurang diminati oleh responden sebanyak 34,2 persen, dan sisanya menjawab tidak tahu.

Keengganan untuk beralih ke sektor formal disebabkan adanya kendala yang dihadapi oleh tukang becak misalnya ijazah SD dan rendahnya skill mereka untuk terlibat dalam kegiatan pekerjaan formal.

Lingkungan Politik

Potret kehidupan politik pekerja sektor informal dalam kajian ini meliputi keterlibatan mereka dalam proses pengambilan di lingkungan terdekat mereka maupun kecukupan informasi atas berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

Keterlibatan pekerja sektor informal di kota cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari jawaban 65,3 persen responden yang menjawab bahwa mereka pernah diajak dalam musyawarah baik dilingkungan RT mereka.

Keterlibatan dalam musyawarah pembangunan tidak sebanding dengan keterjangkauan informasi setiap kebijakan terutama kebijakan tentang perda. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mereka akses secara umum biasanya berkait dengan pembagian beras maupun bantuan langsung berupa pembagian uang (BLSM) dan pembagian kebutuhan dasar lainnya. Mereka merasa tidak tahu atau tidak perlu, mencari informasi tentang kredit mikro, kebijakan di sektor pertanian maupun kebijakan strategis lainnya yang berjangka panjang dan tidak segera bisa dirasakan manfaatnya dalam benak mereka. Atas kondisi ini, diperlukan kerja keras agar informasi kebijakan yang bernilai strategis bisa mereka akses.

Berpusat pada Komunitas

Pemberdayaan masyarakat walaupun bisa dilakukan terhadap individu, namun sebagaimana pandangan Friedmann, yang menjadi perspektif dalam

penelitian ini berkesimpulan bahwa pendekatan terhadap komunitas sebaiknya lebih diutamakan.

Konsep pemberdayaan jenis ini, selaras dengan cara pandang tentang kemiskinan yang tidak sekedar melihat persoalan ekonomi semata dan juga bukan persoalan individu, namun dianggap sebagai persoalan kolektif dan sistemik.

Pemberdayaan berbasis komunitas tersebut akan bermanfaat untuk menggerakkan kelompok ini dalam proses pembangunan. Konsep pemberdayaan model ini dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini, kembali oleh Friedmann disebut sebagai alternative kebijakan pembangunan (alternative development), yang menghendaki terjadinya demokrasi inklusif dalam arti pelibatan seluas-luasnya masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan untuk menumbuhkan ekonomi (economic growth), dan dibangun atas kesamaan kesempatan secara gender (gender equality).

Melihat penataan sektor informal perkotaan khususnya tukang becak di Kota Probolinggo, maka penting untuk dikembangkan pemberdayaan berbasis potensi atau asset yang dimiliki kelompok ini dan pemerintah masuk untuk memperkuat melalui tangan kebijakannya (lihat dalam tabel).

Mencari desain pelatihan atau implementasi sebuah program, diawali oleh serangkaian diskusi mendalam untuk mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Diawali oleh pencarian bakat individual peserta serta ketersediaan sumber daya pendukung, jejaring dan yang lebih penting mengungkapkan pengalaman dari kreatifitas ini.

Tabel. 5.10
Jenis Aset, Potensi dan Penguatan

No	Jenis Aset	Potensi	Penguatan
1	Modal Sosial	Kedekatan hubungan dalam kelompok janggolannya	Mengelola dan membuat tempat janggolannya yang representatif dan dibuat identitas kelompok
		Kerelaan untuk membantu sesama pekerja di tempat mangkal	Menjadikan sebagai sarana pertukaran informasi strategis pemerintah dan asset kebersamaan dikelola untuk terlibat dalam program pemerintah secara kolektif
2	Sumberdaya Fisik (Skill)	Walaupun masih bersifat individual,	Membangun kelompok berbasis kesamaan profesi

	dan Alam	<p>bakat yang dimiliki sebagian komunitas ini membuat kurungan ayam</p> <p>Ketersediaan bahan material untuk keterampilan ini cukup melimpah. Bambu, Lidi dsb.</p> <p>Berperan sebagai buruh tani, sebagian besar berada pada pekerjaan sampingan ini.</p> <p>Sebagian anggota keluarga, umumnya istri tukang becak memiliki usaha mracang di pasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusahakan kios bagi kelompok pengrajin ini - Memberi bantuan peralatan bagi kelompok - Melindungi dan melestarikan tanaman yang bermanfaat bagi lingkungan dan pengrajin anyaman bambu - Pemerintah membatasi ekspansi penggunaan lahan pertanian produktif untuk perumahan dan perkantoran - Pentingnya data untuk melihat seluruh profesi anggota keluarga untuk pengukuran kesejahteraan - Penting untuk mengadakan pelatihan bagi anggota keluarga untuk menopang kesejahteraan dalam keluarga
3	Agama dan Sosial Budaya	Perkumpulan lebih didorong oleh kepatuhan yang tinggi akan tradisi dan kebiasaan setempat	Menjadikan sebagai media untuk pembentukan soliditas kelompok ataupun memanfaatkan untuk saluran informasi dari pemerintah

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, 1986, Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi, Jakarta: LP3ES.
- Arendt, H.W, 1991, Pembangunan Ekonomi, Studi tentang Sejarah Pemikiran, Jakarta: LP3ES.
- Basri, Faishal, 30 Mei 2006, Pemberdayaan Pasar Tradisional, makalah yang disampaikan pada Rapat Kerja Nasional APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Seluruh Indonesia), Hotel Sentral Jakarta.
- Boeke, J.H dan Burger, 1973, Ekonomi Dualistis: Dialog antara Boeke dan Burger, Jakarta, penerbit Bhratara
- Budiman, Arif. 2000, Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Chambers, Robert, Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang, (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Coryn, Chris L. S. and Catherine Borshuk, The Scope of Justice for Muslim Americans: Moral Exclusion in the Aftermath of 9/11, The Qualitative Report Vol 11 No 3 September 2006, <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR11-3/coryn.pdf>.
- Dokumen Hasil Kongres Abang Becak Kota Probolinggo.
- Friedmann, John. 1979. Urban Poverty in Latin America, Some Theoretical Considerations.
- _____. 1989., Regional Development Policy; A Case Study of Venezuela Cambridge. Mass M.I.T. Press.
- Geertz, Clifford, 1992, Penjaja dan Raja, Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia, Alih bahasa: S. Supomo, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Goldthorpe, J. H, 1992, Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pembangunan, Alih bahasa: Sukadijo, Jakarta: Penerbit Gramedia.

- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Lipton, Michael, 1977, *Why Poor People Stay Poor*. Canberra: Australian National University Press
- Neuman, W. Lawrence, 2003, *Sosial Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches 5th ed.*, New York: Pearson Education Inc.
- Probolinggo Dalam Angka 2006, 2009.
- Rachbini, Didik J. 1996. *Ekonomi Politik, Paradigma, Teori dan Perspektif Baru*, CIDES: Jakarta.
- Sajogjo (ed), 2005, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Kancah Globalisasi*, Bogor, Penerbit: saIns.
- Salim, Agus, 2002, *Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Jogjakarta, Penerbit Tiara Wacana.
- _____, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Tiara Wacana.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah (ed), 2005, *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo dkk, 1993, *Wanita dan Pasar Tradisional*, Surabaya: Penerbit Paramawidya.